

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI ILEGAL

Menjamurnya usaha gadai ilegal, telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian untuk menciptakan pergadaian yang sehat dan tertib. Namun, banyaknya perusahaan gadai yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan kekhawatiran karena tidak ada standarisasi mekanisme dalam menjalankan usaha gadai sehingga bisa mencederai hak-hak nasabah gadai.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh penulis diperoleh dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta dan studi kepustakaan yang kemudian di uraikan dan dikaji secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bentuk pengawasan yang dilakukan OJK terhadap usaha gadai ada 2 yaitu pengawasan mikroprudensial dan *conduct of business* namun, bagi perusahaan pergadaian yang belum mendaftar dan memiliki izin usaha sesuai dengan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pengawasan yang diberikan hanya berupa pemantauan dari luar saja.

Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai dapat ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan lembaga diluar peradilan. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah gadai ilegal yang dilakukan oleh OJK adalah dengan melakukan pengawasan *market conduct* dan kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi.

Kata kunci : pengawasan OJK, pergadaian

ABSTRACT

Legal Protection For Illegal Pawn Customers

The rise in illegal of pawn business has led Financial Services Authority (OJK) to issue POJK Number 31/POJK.05/2016 about Pawn Business in order to create a healthy and orderly pawn. But, there are many pawn companies that are not registered on Financial Services Authority (OJK) caused a certain concern because there is no standardization mechanism for pawn business and it can injure pawn customers' rights.

The method of its approach that used in this research is juridical empiric approach method with the specification of descriptive analytical research. The data that writer used are obtained from Financial Services Authority (OJK), Jakarta and literature studies which disassembled and reviewed systematically.

Based on the research, it can be expressed that there are two forms of supervision that Financial Services Authority (OJK) do towards pawn business, those are microprudential and conduct of business but for pawn business hasn't registered yet based on POJK Number 31/POJK.05/2016 about Pawn Business, the supervision that Financial Services Authority (OJK) provide is monitoring from the outside.

Legal protection to pawn customers may be taken through 2 (two) phase, those are settlement that is done by Financial Services Institution and judicial institution or other institution beside judicial. The form of legal protection for illegal pawn customers that Financial Services Authority (OJK) do are monitoring market conduct and synergizing with Investment Alert Task Force.

Keyword: Financial Services Authority (OJK) Supervision, Pawn Business